

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi yang ada di negara Indonesia telah mengalami pasang surut. Dimana ditandai dengan adanya era reformasi yang telah membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainnya yang telah mengalami pergeseran struktur sejak reformasi bergulir. Perubahan sistem yang multi dimensional seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik ditingkat pusat maupun daerah yang menuntut adanya pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis, dengan harapan terciptanya suatu kestabilan politik yang dinamis.

Demokrasi di negara Indonesia telah ada semenjak berdirinya Republik Indonesia dengan masalah pokok sangat beraneka ragam seperti budaya, tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik, dalam kehidupan politik hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitupula demokrasi di tingkat lokal sudah berlangsung sejak lama, apalagi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta di amandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Selanjutnya pemilihan umum yang bersifat kedaerahan (PILKADA) telah menjadi agenda penting bagi setiap daerah. Bagi institusi partai politik pergeseran mekanisme dari sistem perwakilan ke sistem langsung telah mengharuskan

institusi partai politik melakukan pembenahan dalam strategi pendekatannya untuk meraih kesuksesan di rana eksekutif. Hal ini dikarenakan bahwa pasar atau pemilih bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan masyarakat secara luas yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Guna mengefektifkan strategi pendekatan kepada pemilih di pemilukada maka seorang kontestan dituntut harus mampu memasarkan dirinya ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman dan keterbatasan di daerah pemilihan. Metode pemasaran politik (*political marketing*) merupakan strategi kampanye yang sedang disukai saat ini, secara sadar ataupun tidak pendekatan *marketing* dalam dunia politik telah dilakukan oleh para kontestan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada pemilih (warga).(Arifin Lerah 2013 : 2)

Pelaksanaan pemilukada atau masa pemilihan bupati/wakil bupati di daerah (provinsi/kabupaten), warga masyarakat, yang sudah punya hak untuk terlibat di dalam pemilukada, jadi sasaran perebutan oleh kekuatan politik seperti partai politik. Kekuatan politik yang bertarung memenangkan pemilukada tak punya pilihan lain, selain menciptakan kondisi terbuka dan menarik untuk merebut hati warga masyarakat yang akan memilih (M. Khoruil Anwar dan Vina Silvina OS2006:56)

Ideologi partai yang sangat terbuka, baik itu atas dasar agama, etnik, golongan maupun identitas kelompok, bagaimanapun telah membuka ruang pertarungan politik yang lebih besar dalam konteks politik kekuasaan khususnya dalam pelaksanaan Pemilukada Bolmut tahun 2018 mendatang. Demikian juga,

partisipasi masyarakat dalam pergantian Bupati Bolmut setiap periode jabatan berbeda-beda, ada yang sebagai kelompok pendukung, sebagai kelompok oposisi, maupun sebagai kelompok netral yang mencoba untuk mengawasi proses sirkulasi elit. Tak jarang juga masyarakat digunakan sebagai alat kepentingan dalam proses politik.

Fenomena pemilihan kepala daerah di Bolmut yang lalu membahana di mana-mana. Hampir setiap sudut wilayah, misalnya atribut seperti baliho dan spanduk yang mewakili para kandidat dengan nuansa yang sangat promosif. Di media cetak khususnya surat kabar lokal pun terdapat iklan para calon bupati dan pasangannya serta dengan janji-janji politik mereka, disebutkan ada empat pasangan kandidat yang bertarung memperebutkan kursi “panas” di kantor Bupati Bolmut yang telah ditetapkan oleh KPU adalah Drs. Hi. Depri Pontoh- Suriansyah Korompot, SH (PPP), Hamka, SH, MAP- Fellix Andre Mende. ST (Hanura, PKB, Partai Republik Nusantara, PBB, Partai Bintang Reformasi, Partai Matahari Bangsa), Karel Bangko, SH-Moh. Irianto Cristopel Buhang, S.Sos (PDIP, Golkar), Drs. H. Hamdan Datunsolang, MM- Farid Lauma, SE (PAN). Keempatnya memiliki keunggulan masing-masing, diatas kertas.

Dikatakan bahwa parpol boleh jadi dapat menjadi mesin politik yang efektif untuk memenangkan pemilihan, kemenangan calon sangat dipengaruhi oleh komitmen dari konsituennya untuk secara ideologis memilih calon yang diusung oleh partai bersangkutan. Dalam satu kondisi Parpol bisa menjadi kekuatan jika didukung dengan manajemen tim sukses yang baik dan mampu mempopularkan calon sehingga mampu mengdongkrat suara.

Nama-nama kandidat di atas dapat dipastikan terdapat beberapa orang yang akan mencalonkan ulang dalam pilkada Bolmut mendatang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nama-nama di atas telah melakukan pengisian formulir penjurangan bakal calon di setiap sekretariat partai politik di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Proses pemilukada sebagai suatu mekanisme politik untuk menggantikan kepala daerah merupakan suatu keniscayaan dalam demokrasi prosedural.

Pada momen menjelang pemilukada 2018 di Bolaang Mongondow utara membuka kembali kontestasi politik ditingkat lokal. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya kompetisi para calon-calon kandidat dan partai politik dalam upaya memobilisasi politik dalam mendulang dukungan kepada pemilih dalam memenangkan setiap event ada pertarungan politik ditingkat lokal. (Leo Agustino 2009 : 17).

Melihat pertarungan politik menjelang pelaksanaan Pemilukada 2018 di Kabupaten Bolmut semua kandidat telah mempersiapkan strategi politiknya dalam memenangkan pemilu kepala daerah. Salah satunya dalam mendekati figur-figur yang dianggap memegang peran sentral dalam masyarakat (Tokoh adat dan tokoh agama). Seperti pada pemilu sebelumnya faktor ketokohan dalam masyarakat kerap menjadi suatu cara untuk mendongkrak popularitas pasangan kandidat.

Dalam kultur masyarakat Bolmut khususnya pada masyarakat Bolang Itang Barat, yang masih dipertahankan saat ini adalah image ketokohan masih merupakan syarat utama menjadi seorang pemimpin yang dihormati pada masyarakat, dimana ketokohnya masih mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tidak heran bila semua pasangan kandidat dan tim

sukses melakukan berbagai pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi opini sang tokoh, dengan harapan tokoh tersebut akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat. Pola-pola ini merupakan pola-pola umum yang digunakan semua kandidat dalam bursa politik kepala daerah di Bolmut. Sejah ini, pola komunikasi tradisional masih menjadi pilihan strategi dominan oleh para kandidat dan tim sukses dalam memobilisasi massa. Tokoh keagamaan dan tokoh adat merupakan sasaran kampanye paling strategis.

Menariknya, setiap tahapan dalam pelaksanaan pesta demokrasi berskala lokal ini selalu menghadirkan fenomena tersendiri, terutama menghangatnya iklim kompetisi politik di antara para calon yang akan maju menjelang pelaksanaan pilukada.

Upaya para calon untuk menarik simpati pemilih biasanya dikemas dalam berbagai strategi yang langsung “bersentuhan” dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat (pemilih). Selain itu, strategi yang dimunculkan oleh para calon bupati, tak dapat dihindarkan, juga dipublikasikan melalui media massa. Media masa dijadikan alat sebagai instrumen mobilisasi politik yang efektif menjelang pilkada.

Media masa adalah salah satu wahana yang berperan penting di dalam menyampaikan orasi politik para calon kandidat yang akan bertarung nantinya. Iklan-iklan dalam membangun citra kandidat serta partai politik dituangkan disini. Terlebih di era digital sekarang ini banyak kalangan masyarakat ingin mencari sumber informasi tentang perkembangan pilkada. Media masa juga di jadikan sebagai arena konflik politik, mengingat peran media masa yang begitu kuat dalam mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak (Heriyanto, Gun Gun, 2010:3).

Fenomena yang masih terus ada di setiap pemilihan umum yaitu masyarakat Bolmut lebih cenderung melihat dari segi primordial, yakni melihat calon dari daerah yang sama atau kharisma dan wibawa dari keturunan keluarganya, bisa terlihat dari daerah Bolmut yang memiliki 6 Kecamatan dipetakan garis tebal sebagai wilayah kantong suara masing-masing kandidat (elit politik local yang bertarung). Pemetaan kantong suara tersebut dipertegas dengan terbaginya zona lingkungan masyarakat sebagai wilayah sang kandidat, ini dapat terlihat dari berbagai spanduk dan baliho yang terpasang di jalan-jalan umum yang mengindikasikan bahwa kawasan tersebut adalah bagaikan milik seorang kandidat.

Dengan banyaknya masyarakat Bolmut yang merupakan pemilih potensial, maka tidak salah bila para pasangan kandidat berjuang keras untuk bisa mendapatkan dukungan mayoritas. Terlepas dari apapun hasil dan siapa pemenangnya, ada hal tercela yang tidak diamati. Sistem yang dilakukan telah mengarah kepada politik mobilisasi daripada demokratisasi itu sendiri. Apalagi pada pemilu di Bolmut mendatang suhu politiknya sangat memanas sehingga membuat pesta demokrasi semakin seru dan menarik untuk dikaji.

Disisi lain menjelang pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara aktor politik lokal juga memiliki peran sentral dalam memainkan strategi mobilisasi dukungan dari khalayak politik. Biasanya dalam menjelang pilkada para aktor politik di tingkat lokal melakukan safari politik membangun komunikasi kepada masyarakat tujuannya tidak lain adalah masalah kepentingan pilkada. Menurut Brian McNair (2003 :5) Aktor politik merupakan individu-

individu yang melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Dinamika politik lokal memang memberikan warna tersendiri terutama di Kabupaten Bolmut. Pemilu yang akan dilaksanakan di daerah pun diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan berpolitikan di tingkat lokal, membawa nilai-nilai identitas lokal baik secara sosio-ekonomi, politik, serta budaya masyarakat yang kesemuanya ini dipolitisasi serta di jadikan instrumen dalam memobilisasi dukungan dari pemilih oleh setiap aktor politik di tingkat lokal.

Dalam kontestasi menjelang pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam perkembangannya ada hal yang masyarakat hanya memperhatikan gerakan-gerakan politik dari setiap bakal calon maupun parpol. Padahal ada hal besar yang perlu juga disoroti dalam struktur pemerintahan yakni adanya indikasi keterlibatan birokrasi dalam momentum pemilu. Agenda pemilihan umum kepala daerah (pemilu) secara langsung oleh rakyat di berbagai daerah, telah menunjukkan pentingnya perhatian terhadap persoalan netralitas birokrasi. Sorotan terhadap masalah ini terkait dengan dugaan masih kuatnya intervensi kekuasaan terhadap birokrasi yang tidak lain merupakan konsekuensi dari posisi *incumbent* yang menominasikan dirinya kembali pada kurun waktu pemilu berikutnya. Bahkan, tidak hanya itu, para kandidat *non incumbent* pun ikut mencoba untuk mempengaruhi aparat birokrasi setempat.

Politisasi birokrasi memang sering terjadi di setiap daerah otonom dalam pertarungan politik di Indonesia. Politisasi birokrasi dalam bentuk mobilisasi dukungan di kalangan pegawai negeri sipil akan terjadi sebelum perhelatan pemilu. Di Bolaang Mongondow Utara khususnya di Kecamatan Bolang

Itang Barat sendiri hal ini tidak bisa terhindarkan dan bukan lagi menjadi rahasia umum.

Konstruksi intervensi, memang seringkali bukan melalui kandidat bersangkutan, tetapi terutama melalui para pendukung masing-masing yang tergabung dalam tim suksesnya. Adanya intervensi politik partisan dalam konteks pemilukada, membawa implikasi tersendiri pada konteks pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas utama pemerintahan daerah Prayudi (2013 :3).

Para kontestan serta partai politik masing-masing memiliki cara yang jitu dalam melakukan strategi kekuatan politik di daerah sebagai basis suara sehingga dapat memperoleh kemenangan. Dengan mengambil tolak ukur pada momen Pemilukada yang lalu, dimana peran kekuatan politik sangat berperan meraup suara pasangan calon kandidat telah mempersiapkan strategi politiknya, untuk berlomba-lomba mengimplementasikan strategi dalam memobilisasi masyarakat untuk meraih kekuasaan politik ini.

Berangkat dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti ***“Strategi Mobilisasi Politik Menjelang Pilkada 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana Strategi Mobilisasi Politik Menjelang Pilkada Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ?

- b. Apa saja yang menjadi instrumen mobilisasi politik menjelang pilkada 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari sajian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Mobilisasi Politik Menjelang Pilkada Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi instrumen mobilisasi politik menjelang pilkada 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam menambah wawasan keilmuan dalam kajian ilmu politik khususnya untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pkn dan juga mahasiswa lainnya yang tertarik dengan bidang politik.

- a. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti.

- 1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

pendidikan pada Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi. Pkn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis bagi peneliti dalam mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi keberhasilan proses pelaksanaan pembangunan politik yang demokrasi di tingkat lokal

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya terutama pada masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat.